

Judul: Pemantapan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Utama *Good Governance* dalam Pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

A. Latar Belakang

Persoalan terbesar bagi bangsa Indonesia dan negara berkembang lainnya terletak pada masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran yang hingga kini belum juga dapat dituntaskan. Berbagai upaya telah dilakukan dan bermacam program telah pula dibuat untuk menuntaskan problem tersebut, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, namun persoalan kemiskinan masih menjadi topik utama dalam pembangunan. Tidak salah kiranya hingga kini, hampir semua kepala daerah menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai program kebijakan prioritas yang terus digaungkan.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk mengurangi atau menghapuskan kemiskinan nampaknya juga belum mampu secara signifikan mencapai harapan yang diinginkan. Sebagai contoh misalnya kebijakan yang ditujukan untuk kawasan desa tertinggal, yaitu dengan dikeluar-kannya Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dulu pernah dicanangkan, nampaknya juga hanya meninggalkan label permanen bagi masyarakat desa yang miskin hingga saat ini. Program yang dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi produktif di pedesaan dengan memberi insentif usaha kepada masyarakat ini, pada kenyataannya belum membawa dampak yang berarti bagi kehidupan masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa-desa yang dulu masuk dalam berbagai program penanggulangan kemiskinan hingga saat inipun masih tetap menampilkan sosok kemiskinannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa desa bekas IDT di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar misalnya, potret kemiskinan masih terpampang dengan jelas dalam kehidupan masyarakatnya. Ini berarti kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan tersebut tidak

memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap upaya untuk me-ngurangi kemiskinan. Bahkan yang sering kali terjadi adalah bahwa kebijakan tersebut justru malah memberikan keuntungan yang tidak semestinya diterima oleh orang-orang atau kelompok tertentu saja.

Data statistik menunjukkan angka kemiskinan tahun 2011 di Kabupaten Kampar masih tergolong tinggi, yakni 10,47%. Angka ini lebih tinggi dibanding-kan angka kemiskinan Provinsi Riau yang pada tahun yang sama berada pada angka 9,2%. Dari 710.000 orang penduduk, berarti masih ada 75.000 orang yang masih berstatus miskin. Masih tingginya angka kemiskinan ini menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Kampar periode 2011-2016. Karenanya Bupati dan Wakil Bupati Kampar terpilih, Jefry Noer-Ibrahim Ali menjadikan penang-gulangan kemiskinan ini sebagai prioritas pembangunan ke depan.

Program yang diusung Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah membangun berbagai skenario untuk me-niadakan kemiskinan atau dikenal dengan program "zero kemiskinan" dengan konsep yang sederhana, tidak berbelit-belit, dan sangat aplikatif. Sasaran utamanya adalah memberantas pengangguran dan rumah-rumah kumuh. Namun diakui sendiri oleh Bupati Kampar, bagaimanapun giatnya pemerintah berupaya memberantas kemiskinan, tanpa ada keinginan untuk berubah dari masyarakat itu sendiri, maka upaya tersebut tidak akan berarti apa-apa. Karena menurutnya, hal yang mendasar sebagai penyebab kemiskinan, adalah sifat malas dan tidak adanya motivasi secara kontinyu untuk mengembangkan sumber daya yang ada.

Dari pernyataan di atas, dapat dimaknai bahwa salah satu unsur penting dalam pemberantasan kemiskinan, adalah perlunya kemauan dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat ini juga yang menjadi perhatian pemerintah dalam proses pembangunan bangsa semenjak bergulirnya era reformasi. Karena itu, pemerintah telah menetapkan partisipasi

sebagai salah satu prinsip utama dalam penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dikeluarkan Bappenas (2008). Partisipasi di sini maksudnya adalah semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka.

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankannya, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi, dan sebagainya.

Dengan demikian, kepentingan masyarakat dapat tersalurkan di dalam penyusunan kebijakan sehingga dapat mengakomodasi sebanyak mungkin aspirasi dan kepentingan masyarakat, serta mendapat dukungan masyarakat luas. Kehadiran dan keikutsertaan warga masyarakat dalam forum pertemuan publik, serta keaktifan mereka dalam menyumbangkan pikiran dan saran menunjukkan bahwa urusan pemerintahan juga menjadi urusan mereka dan bukan semata urusan birokrat. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tidaklah mudah mengikutsertakan semua lapisan masyarakat dalam suatu forum sekaligus.

Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberi akses kepada seluruh masyarakat serta wakil dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi menyuarakan kepentingan kelompok yang diwakilinya dan mengajukan usul serta pikiran dalam forum-forum pertemuan publik, misalnya pada musyawarah pembangunan tingkat desa dan kecamatan atau konsultasi regional pembangunan. Kurangnya partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan menyebabkan kebijakan publik yang diputuskan tidak mampu mengakomodasi berbagai aspirasi

dan kepentingan masyarakat, yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Agenda peningkatan partisipasi efektif dalam sosial, politik, dan ekonomi. Artinya pemerintah harus memberikan terobosan dan peluang yang lebih inovatif, yang lebih memungkinkan partisipasi masyarakat dan sektor privat agar lebih berkembang secara efektif dan efisien. Konsultasi publik, dialog publik, forum pertemuan dengan berbagai *stakeholders* harus ditingkatkan, sehingga mampu mendorong komitmen bersama untuk pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional seharusnya ditata kembali, sehingga bukan hanya menjadi pertemuan formal perencanaan tetapi harus benar-benar merupakan forum yang mewakili semua elemen masyarakat.

Sebagai salah satu kecamatan yang berpenduduk besar, yakni 46.476 jiwa di Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Riau, Kecamatan Tambang agak lambat perkembangan pembangunannya. Padahal jika dilihat dari segi umur, kecamatan ini termasuk kategori tua karena sudah berdiri sejak tahun 1990. Lambatnya pembangunan ini diakui Camat Tambang salah satunya disebabkan karena rendahnya partisipasi masyarakat. Pertumbuhan penduduk di kecamatan ini memang cukup tinggi yang disebabkan oleh pertumbuhan perumahan yang ada di desa-desa perbatasan dengan Kota Pekanbaru, namun pertumbuhan penduduk yang tinggi ini tidak sebanding dengan peningkatan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan.

Berdasarkan keterangan dan fenomena yang ditemukan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah menarik. Penelitian ini secara singkat mengambil judul “Pemantapan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar

Utama *Good Governance* dalam Pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Fokus kajiannya diarahkan untuk melihat apakah setiap warga sudah mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemantapan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama *good governance* dalam pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pemantapan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama *good governance* dalam pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui bentuk pemantapan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama *good governance* dalam pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?
2. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pemantapan partisipasi masyarakat sebagai pilar utama *good governance* dalam pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

D. Tinjauan Pustaka

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang artinya keikutsertaan/mengikutsertakan. Seseorang yang melakukan partisipasi dapat dikarenakan oleh kesadaran sendiri atau karena dimotivasi oleh seseorang/pimpinan. Para ahli pembangunan pada

umumnya bersepakat pada satu pengertian bahwa partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan peman-tauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga akar rumput seperti LKMD/K, PKK, dan Karang Taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama.

Seiring dengan terbukanya keran kebebasan dan demokrasi di Indonesia, kini mulai terjadi perubahan paradigma pembangunan. Pendekatan “top down”, dimana segala sesuatunya diputuskan dari atas mulai ditinggalkan. Setiap kebi-jakan kini semakin mengakomodir suara masyarakat, sehingga pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pembangunan sebagai proses peningkatan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya mengandung arti bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses itu, dalam hal inilah partisipasi mengambil tempatnya. Partisipasi atau *empowerment* merupakan bagian proses dan definisi pembangunan. Di sini menyebutkan bahwa pembangunan berarti penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Satu-satunya cara untuk menciptakan mekanisme dari dalam (*built in*) guna meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang sangat tidak adil ialah menjadikan rakyat mempunyai pengaruh.

Dalam kaitannya dengan perilaku startegis ini, makin besar kebebasan yang dimiliki rakyat, makin besar pula bobot tindakan mereka atas kebijakan. Dalam hal ini pula, partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh pihak-pihak untuk merealisasikan suatu kegiatan. Betapapun besarnya pengaruh konsep partisipasi tersebut dalam pembangunan, pasti menyiratkan usaha yang besar untuk mewujudkan hal tersebut baik dalam tataran kebijakan dan praktek. Contoh dalam praktek sudah banyak terjadi, sejumlah program pemerintah yang diharapkan menjadi solusi malah meninggalkan banyak pertanyaan dan pekerjaan yang seolah-olah berantai (*multiplier effects*). Pada akhirnya, konsep suatu program yang direncanakan cukup lama harus dikonsep ulang bahkan diganti dengan metode yang berbeda.

Mendorong partisipasi masyarakat ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah memang membutuhkan pertimbangan yang matang. Bukan saja dari segi biaya yang harus dan akan dikeluarkan tetapi juga apakah efisien dan efektif bila program itu dikerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Setidaknya pernyataan di atas memandang bahwa belum tentu semua program akan efektif bila dikerjakan bersama masyarakat. Namun setidaknya ada tiga hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mendukung program pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu melalui pemberian informasi, menyediakan dukungan politik, dan menyumbangkan sumber daya.

Atas pemikiran inilah, maka Slamet (1995) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan dapat ditingkatkan dan ditumbuhkan. Menurutnya masyarakat akan berpartisipasi secara aktif dikarenakan paling tidak atas 3 (tiga) faktor, yaitu: 1) Adanya kesempatan, dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta mewujudkan pembangunan yang dilakukan di daerahnya, 2) Adanya kemauan, dalam hal ini masyarakat memiliki kemauan yang tinggi untuk mewujudkan pembangunan yang ada di

daerahnya, sehingga program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terealisasi, dan 3) Adanya kemampuan, dalam hal ini masyarakat diharapkan mampu untuk berpartisipasi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang sudah direncanakan.

Louis dan Coralie (1989) membagi partisipasi ke dalam tiga bentuk, yaitu partisipasi horizontal, partisipasi vertikal dan partisipasi dalam proses administratif dan politis. Partisipasi vertical adalah partisipasi serta yang mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit dan pejabat, dan hubungan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini yang menjadi fokus bukan terletak pada bagaimana mempengaruhi pemerintah melainkan lebih pada pengembangan hubungan tertentu yang dapat memberikan manfaat. Partisipasi horizontal adalah partisipasi yang melibatkan pihak-pihak secara kolektif dalam upaya mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan. Sedangkan partisipasi yang terakhir merupakan kegiatan kelompok kepentingan untuk mengolah keputusan administratif, atau pertukaran (*exchange*) tertentu antara patron dan klien. Biasanya cakupan partisipasi ini lebih luas dari pada partisipasi-partisipasi sebelumnya.

Pada masa mendatang, dalam kaitannya dengan pelaksanaan konsep *good governance*, pemantapan peran dan fungsi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu dilakukan. Pemantapan peran dan fungsi tersebut tidak cukup hanya dengan menjabarkannya ke dalam bentuk konsep atau aturan normatif (regulasi) saja, sebab konsep dan regulasi tersebut hanya merupakan acuan dasar untuk mulai menerjemahkannya ke dalam bentuk yang nyata dan aplikatif, baik itu program-program kerja pemerintah, proyek pengentasan kemiskinan ataupun regulasi/deregulasi wewenang yang lain.

Dalam hal ini, masyarakat tentu saja menjadi sorotan utama dari ketiga elemen utama *good governance*. Bukan karena peran dan fungsi pemerintah maupun sektor swasta memang telah berjalan sebagaimana mestinya tetapi kedua elemen tersebut setidaknya sudah mampu

merumuskan peran dan fungsinya dalam bentuk yang lebih jelas. Patut diakui bahwa masyarakat memang mempunyai peran dan fungsi tersendiri, tetapi pemantapan dan pelembagaannya tentu sangat sulit dilakukan. Imbas yang terjadi kemudian, masyarakat masih dipandang sebagai aktor kesekian dari setiap proses perumusan kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Kekuatan untuk saling mempengaruhi dan daya tawar (*bargaining position*) hanya didominasi oleh pemerintah dan swasta, padahal hasil dan akibat yang muncul adalah (kalau tidak bisa dikatakan sepenuhnya) ‘konsumsi’ masyarakat umum.

Budiarjo (2005) mengutip pendapat J. Laski, bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Pengaturan dan perwujudan keinginan-keinginan tersebut kemudian diletakkan kepada organ yang dinamakan pemerintah. Legitimasi tersebut didasarkan pada kedudukan pemerintah yang diharapkan akan mampu berperan sebagai pencipta kebahagiaan bagi rakyatnya. Peran yang diberikan tentu saja memungkinkan pemerintah menyelenggarakan segala aktivitas demi kemaslahatan bersama.

Keputusan-keputusan para elit politik (pemerintah dalam arti luas) biasanya ditanggung oleh mereka yang tidak berpendidikan formal, mereka yang dari hari ke hari mengadu nasib di tengah sawah dan mereka yang mengais di tengah tumpukan sampah. Oleh karena itu, pada akhirnya setiap keputusan dan kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan *bonum commune* dalam *civil society*. Ketidakseimbangan ini yang menjadi sumber penghambat mulusnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan kehidupannya sendiri sebab hubungan yang terbangun adalah hubungan yang bercirikan birokratis dan tertutup terhadap masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam setiap kegiatan selain agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya masyarakat juga dapat mengetahui itikad baik pemerintah.

Masyarakat sadar akan pembangunan melalui partisipasi karena suatu pembangunan dari rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban masyarakat, oleh karena itu pemerintah berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat tersebut melalui produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang jelas tentang pembangunan melalui partisipasi masyarakat, dan sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat mereka harus berperan aktif demi terlaksananya pembangunan.

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi, menurut Cohen (1997), akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan, sebab dukungan masyarakat merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Atas dasar ini Cohen mengemukakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain :

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Kondisi ini semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan operasional program pembangunan yang dilaksanakan.
3. Partisipasi dalam menerima hasil, dimana masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat digunakan oleh generasi yang akan datang.

Pada akhirnya tujuan dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara professional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan di dalamnya. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau

kelompok yang terkena oleh suatu keputusan-keputusan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Hal ini didasari pada motivasi dari individu-individu di dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap Musrenbag yang dilaksanakan. Tanpa adanya motivasi sebagai penggerak dalam diri individu, maka partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan misalnya, tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

E. Metode Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sumber data utama dari penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Sumber data pendukung berasal dari informasi berupa hasil wawancara kata-kata informan. Penentuan informan dimaksudkan untuk menjangkau sebanyak mungkin info dari berbagai sumber yang berada di dalam lokasi yang diteliti. Tujuannya untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik (*uniquess*). Informan ditentukan dan dipilih secara sengaja (*purposive*) setelah melalui analisis terhadap sejumlah calon nara sumber dengan cara "bola salju" (*snow ball effect*).

Penelitian kualitatif proses penelitiannya berbentuk siklus, yang artinya kegiatan pengumpulan data dan analisa data langsung secara simultan. Untuk itu sangat diperlukan kepekaan teoritik dalam proses pengumpulan data dan analisa data di lapangan, karena itu peneliti sendirilah yang bertindak sebagai instrumen utama. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat menyajikan gambaran maupun hasil analisa yang tidak hanya berbentuk angka-angka, melainkan gambaran yang lebih mendalam sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diselidiki. Selanjutnya metode deskriptif yang menggunakan analisa kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Pendekatan ini sifatnya menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini mengambil fokus pada tiga bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tambang sebagaimana yang diungkapkan Cohen (1971), yaitu partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan partisipasi dalam menerima hasil. Sementara untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tambang menggunakan konsep Slamet (1995) yang menyebutkan ada tiga, yaitu adanya kesempatan, adanya kemauan, dan adanya kemampuan. Selanjutnya akan didiskripsikan satu persatu bentuk dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1. Pemantapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tambang

Keberhasilan suatu proses pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu. Kesatuan ini merupakan bagian yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika

pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu, tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja di tangan pemerintah tetapi juga di tangan masyarakat. Intinya adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, karena itu dalam hal ini untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan perlu ditunjukkan terlebih dahulu oleh kebijaksanaan pemerintah.

2. Partisipasi dalam Perencanaan

Pada tingkatan ini posisi masyarakat ditinjau dari keikutsertaan mereka dalam upaya merencanakan pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan seperti dalam Musrenbang Kecamatan yang diadakan setiap tahunnya. Keterlibatan perencanaan yang dilakukan mungkin lebih cenderung pada tingkat teknis pelaksanaan, sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat ini, tentunya akan memberikan dukungan bagi organisasi kecamatan dalam membuat kebijakan pembangunan yang terarah. Masyarakat dilibatkan dalam penyusunan sistematika pelaksanaan pembangunan, sehingga dengan adanya sistematika atau mekanisme kegiatan yang jelas, diharapkan nantinya masyarakat bisa mengambil peran yang lebih maksimal dalam pelaksanaan program pemerintah.

Perencanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan sangatlah penting. Setidaknya ada lima alasan yang melatarbelakanginya. *Pertama*, karena perencanaan yang disusun akan dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan. *Kedua*, karena dengan adanya perencanaan akan dapat memperkirakan (*forecasting*) kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Organisasi pelaksana sudah bisa memperhitungkan hambatan dan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Ketiga, karena dengan adanya perencanaan dalam disusun alternatif-alternatif pilihan yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan. Implementor dapat memilih dan menentukan alternatif pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terbaik dan memiliki tingkat resiko yang rendah. *Keempat*, karena dengan adanya perencanaan dapat ditentukan skala prioritas. Implementor dapat menentukan tahapan mana yang menjadi skala prioritas untuk perlu serius dan hati-hati untuk dilakukan. Agar tidak menimbulkan konflik did alam masyarakat disaat pelaksanaan. *Kelima*, karena dengan adanya perencanaan organisasi pelaksana dapat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan,

Partisipasi masyarakat di suatu daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah seyogyanya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana daerah tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat dalam arti luas harus didorong baik melalui regulasi maupun penciptaan iklim demokratisasi yang ideal di daerah. Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program daerah tersebut.

Musrenbang kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan. Musrenbang kecamatan dikoordinasikan oleh Bappeda kabupaten dan dilaksanakan oleh Camat. Tujuan penyelenggaraan Musrenbang kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.

2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.

Terkait dengan Musrenbang ini pada kenyataannya beberapa tahapan proses perencanaan pembangunan belum dilaksanakan, terutama pada tahapan dimana masyarakat belum dilibatkan memutuskan prioritas kegiatan yang akan diajukan ke tingkat kabupaten. Fokus perencanaan belum berdasarkan pada masalah dan kebutuhan masyarakat, karena belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Masyarakat secara keseluruhan belum memperoleh peluang yang sama dalam menyumbangkan pemikiran dan masih terkendala waktu dan tempat. Masyarakat belum dilibatkan dalam memutuskan kegiatan yang akan dijadikan prioritas untuk diusulkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Beberapa peserta Musrenbang Kecamatan Tambang 2013 mengeluhkan kegiatan Musrenbang yang masih bersifat seremonial sehingga mereka kurang antusias mengikutinya. Usulan dari masyarakat seringkali diletakkan pada kepentingan yang ke sekian kali dari kepentingan utama, sehingga Musrenbang telah dijadikan sebagai alat legitimasi oleh pemerintah semata. Akibatnya kegiatan ini berjalan tidak efektif karena pesertanya kurang partisipasif. Hal ini bisa dilihat dari tingkat keterwakilan masyarakat yang menghadirinya yang terkadang tidak mencapai target. Musrenbang yang awalnya dianggap sebagai forum penjangkaran aspirasi publik secara luas untuk menerima masukan terhadap berbagai rencana pemerintah, nyatanya tidak dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam pembangunan.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang ini lebih karena kelemahan strategi pihak kecamatan. Misalnya sebelum pelaksanaan kegiatan semestinya sudah dilakukan pemetaan para pihak strategis yang diundang untuk turut berpartisipasi. Atas kelemahan ini, sebagai akibatnya selain rendahnya tingkat kehadiran masyarakat, kualitas usulan juga sangat lemah. Usulan yang muncul lebih sering hanya pembangunan atau perbaikan jalan, saluran air, dan usulan yang bersifat terlihat saja. Nyaris tidak ada usulan cerdas seperti kegiatan tentang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan kegiatan keagamaan.

Pihak kecamatan mengakui sampai saat ini memang belum ada metode efektif yang digunakan agar partisipasi masyarakat tinggi pada pelaksanaan Musrenbang. Padahal ide dasar Musrenbang adalah untuk melihat prioritas kegiatan pembangunan, karena kendala ketersediaan anggaran selalu tidak mencukupi kebutuhan. Dari segi konsep dan teori, banyak model yang bisa dikembangkan dalam penentuan prioritas pembangunan. Kenyataannya, prioritas tersebut hanya beriringan dengan apa yang diinginkan pemerintah, sementara pandangan masyarakat belum tentu demikian.

Pemerintah kecamatan terus membuka diri untuk keterlibatan publik dalam menyusun perencanaan agar semakin demokratis, partisipatif, dan efektif. Diakui kemampuan apatur perencanaan kecamatan masih sangat terbatas, sehingga perencanaan yang dihasilkan belum optimal sesuai dengan kaidah-kaidah berlaku. Guna mewujudkan perencanaan yang baik dibutuhkan kuantitas dan kualitas aparatur perencana yang memadai dan sampai saat ini relatif belum terpenuhi sehingga perlu diupayakan ketersediaannya. Bagaimanapun perubahan yang akan dihasilkan oleh suatu kegiatan pemerintah membutuhkan kesadaran mengenai kontribusi yang diberikan oleh pihak lain untuk suatu kegiatan.

3. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Pada tingkatan ini partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan-nya dalam sistem yang sedang berjalan, baik sebagai petugas langsung atau tim pengawas/pengamat pembangunan. Upaya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara operasional ini, terutama ditujukan apabila terjadi penyelewengan atau pelanggaran oleh pembuat kebijakan, maka dapat dengan segera diketahui dan diatasi. Sebagaimana diketahui bahwa setelah Musrenbang disetujui untuk diteruskan ke pemerintah kabupaten, maka pada waktu-waktu berikutnya adalah implemementasi dari kegiatan pembangunan. Pada saat pelaksanaan pembangunan inilah partisipasi masyarakat menjadi tidak kalah pentingnya, karena seringkali kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Di Kecamatan Tambang tidak semua program pembangunan yang ada bisa terlaksana dengan baik. Bahkan ada kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa memperhatikan kondisi masyarakat, lingkungan, dan manfaat dari pembangunan itu sendiri. Disinilah pentingnya masyarakat bisa berpartisipasi aktif, mereka dituntut untuk melihat apakah pembangunan ditujukan sesuai kebutuhan hidupnya atau tidak. Jika kegiatan pembangunan sudah sesuai dengan rencana semula, maka sudah pasti masyarakat tidak punya alasan lagi untuk tidak mendukungnya. Sebaliknya jika pembangunan tersebut bertentangan dengan kehendak masyarakat semula, maka mereka bisa melakukan penolakan.

Dari data yang dikumpulkan, Kecamatan Tambang memang giat-giatnya melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan. Misalnya dalam hal kesejahteraan hidup masyarakatnya, kecamatan ini masih memiliki sebanyak 535 unit rumah kumuh atau tidak layak huni dari 17 desa yang ada dengan penduduk sebanyak 56 ribu jiwa. Saat ini semua rumah kumuh itu setelah diinventarisir masuk kategori rumah tidak layak huni, karena masih berlantai tanah, atap rumah

bocor, dinding rumahnya lapuk, dan juga ada masyarakat yang tidak punya rumah sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, maka kegiatan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat adalah mendapatkan rumah layak huni. Hal ini sesuai dengan harapan pihak kecamatan yang menginginkan tidak ada lagi rumah kumuh di daerahnya. Jika program ini berhasil dilaksanakan, berarti sudah sesuai dengan program Bupati Kampar untuk menzerokan rumah kumuh dan pengangguran. Masyarakat tentu saja berharap ini dapat terealisasi dengan cepat, karena itu mereka siap berpartisipasi dalam bentuk tenaga dan materi yang dibutuhkan.

Bentuk lain program pembangunan yang sedang berlangsung adalah penggiatan pembentukan koperasi. Saat ini sebanyak 17 koperasi yang dinamakan dengan Koperasi Kampar Mitra Mandiri (KKMM) di seluruh desa se-Kecamatan Tambang resmi terbentuk. Koperasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam pengembangan usahanya. Hal ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mewujudkan Pilar Kedua Peningkatan Ekonomi Kerakyatan dengan menyediakan lembaga keuangan yang bergerak pada usaha simpan pinjam.

Sesuai dengan petunjuk Bupati Kampar, tujuan pendirian KKMM di desa tidak lain dan tidak bukan mempercepat penghapusan kemiskinan di setiap desa. Karena itu, hendaknya setiap desa mempunyai lembaga non bank, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi meminjam uang. Dengan terbentuknya koperasi di setiap desa di Kecamatan Tambang, pihak kecamatan berharap hendaknya seluruh pengurus yang terbentuk di desa dapat menyelesaikan legalitas KKMM di desanya masing-masing, sehingga bisa cepat beroperasi karena dana di KKMM kecamatan sudah berada di rekening dan siap dicairkan.

Dari kondisi di atas, dapat dipahami bahwa hal terpenting yang perlu diperhatikan pada tingkat partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ini adalah kesediaan untuk membantu

berhasilnya setiap program pembangunan sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang. Membantu dalam hal ini tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, sudah dikategorikan ke dalam pengertian partisipasi. Karena pada hakikatnya, semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, maka semakin besar partisipasi masyarakat itu dalam kegiatan pembangunan.

Partisipasi secara langsung dalam setiap kegiatan pembangunan suatu masyarakat mutlak bagi tercapainya tujuan pembangunan. Secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut ambil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan. Bila partisipasi ini tumbuh dengan baik, maka proses pembangunan dapat meringankan beban semua pihak dan akhirnya pembangunan itu dapat dirasakan secara adil dan sejahtera.

Berbagai upaya dilakukan pihak kecamatan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat termasuk misalnya menghimpun dana yang cukup untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan uang adalah partisipasi anggota masyarakat yang secara sukarela menyumbangkan uang untuk pembangunan. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam bentuk dana ini karena pembangunan membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara dana yang dianggarkan tidak mencukupi. Tapi memang tidak dalam setiap kegiatan pembangunan membutuhkan partisipasi berupa dana ini.

4. Partisipasi dalam Penerimaan Hasil

Partisipasi pada tingkatan ini dapat dilihat sampai sejauh mana masyarakat ambil bagian atau ikut berperan secara aktif sesuai kemampuan yang dimilikinya terhadap hasil pembangunan. Bisa dikatakan partisipasi masyarakat pada level ini menggambarkan apakah mereka memiliki rasa peduli atau tidak atas hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya

partisipasi yang baik dari masyarakat diharapkan memunculkan kesadaran dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dalam diri mereka sendiri, sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Penerimaan masyarakat terhadap hasil pembangunan di Kecamatan Tambang kurang berjalan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dari tuntutan yang sering dilakukan masyarakat terhadap paratur kecamatan. Misalnya baru-baru ini Kantor Camat Tambang diamuk ratusan warga Desa Aursati. Amuk massa itu dipicu karena Camat Tambang tetap melantik Abdul Razak sebagai Pjs Kepala Desa (Kades) Aursati. Kejadian berawal dari pengunduran diri Kades Aursati Zulfahmi karena mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Untuk menggantikan posisi yang kosong tersebut badan pemerintahan desa (BPD) melakukan rapat dan memilih Sekdes sebagai Pjs Kades. Lalu direkomendasikan ke camat untuk dilantik. Anehnya, camat malah merekomendasikan orang lain dengan menerbitkan SK atas nama Abdul Razak. Sebelumnya, Abdul Razak pernah tercatat sebagai kepala dusun.

Adanya SK tersebut memicu kemarahan warga, dan melalui perwakilan BPD, ninik mamak dan organisasi pemuda mencoba menemui camat untuk menyampaikan keberatan. Akhirnya, kemarahan warga memuncak dan mereka mencoba membatalkan pelantikan yang dilaksanakan di Kantor Camat di Sei Pinang oleh Bupati Kampar yang diwakili Camat Tambang.

Awalnya aksi berjalan dengan lancar, massa hanya berorasi dengan kawalan dari anggota Polsek Tambang dan Satpol PP. Massa meminta agar camat menemui mereka sebelum acara pelantikan agar warga bisa menyampaikan aspirasi, namun sayangnya camat tidak mau dan ngotot untuk melaksanakan pelantikan. Awalnya tujuh orang perwakilan dengan dikawal polisi masuk ke kantor camat, namun begitu mereka naik ke lantai 2 perwakilan ini ditahan Satpol PP dengan alasan acara sedang berlangsung.

Tindakan ini membuat massa panas apalagi masa dari enam desa lain mulai berdatangan. Begitu naskah pelantikan selesai dibacakan camat, massa yang pro dengan Abdul Razak di lantai dua bersorak dan tepuk tangan. Bahkan beberapa di antaranya mengejek. Melihat ini, warga di luar menjadi panas dan melempari kantor dengan batu. Tak ayal kaca pun berpecahan. Suara kaca yang pecah ini membuat emosi warga semakin tersulut, mereka meminta agar camat turun menemui mereka. Namun, camat tidak mau turun dan akhirnya massa menjadi brutal dan melihat mobil dinas camat yang terparkir di depan kantor camat dijadikan sasaran, beberapa warga memanjat mobil dan merusaknya.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa masyarakat belum menerima secara baik hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi kehendak masyarakat tidak didengar ataupun direspon secara utuh. Pemerintah kecamatan bertindak menurut kehendaknya sendiri. Akibatnya kebijakan yang ditetapkan mendapat pertentangan ataupun penolakan yang keras dari masyarakat. Di sini dapat kita lihat kebijakan yang dibuat pemerintah kecamatan tidak melalui mekanisme ataupun persiapan yang matang.

Padahal pembangunan yang baik membutuhkan persiapan yang matang dari mulai perencanaan hingga pelaksanaannya. Sehingga apabila mekanisme yang dibuat sudah mengisyaratkan untuk bisa menghasilkan kebijakan yang berkualitas, maka setiap unsur yang terlibat harus mendukungnya untuk mewujudkan kesuksesan yang diinginkan. Selain itu juga partisipasi masyarakat dalam menerima hasil dapat ditunjukkan dengan tidak adanya pertentangan yang muncul setelah selesai dilaksanakan kebijakan tersebut. Gambaran yang berkembang saat ini adalah masyarakat lebih cenderung kurang bisa menerima hasil kebijakan yang dibuat pemerintah. Apalagi aparat pemerintah tidak bijak dalam memahami dinamika

yang terjadi di lapangan yang pada akhirnya terkadang bisa membuat masyarakat tidak bisa menerima hasil yang telah ditetapkan. Kondisi inilah yang sering menjadi faktor penyebab timbulnya konflik dalam proses pembangunan.

Kejadian di atas hanyalah salah satu kasus dari penolakan yang terjadi terhadap hasil pembangunan di Kecamatan Tambang. Bukan berarti bahwa partisipasi masyarakat di sana rendah terhadap pembangunan yang sudah dilaksanakan. Pada kegiatan lain partisipasi masyarakat berjalan cukup baik. Dalam banyak kegiatan, kehadiran tokoh masyarakat dan masyarakat pada acara yang dilakukan pemerintah kecamatan, masih tergolong tinggi. Misalnya dalam safari dakwah pembangunan Pemerintah Kabupaten Kampar ke Kecamatan Tambang tahun 2013 ini masyarakat sangat antusias mendatanginya.

Pada masa mendatang sangat diperlukan kebijakan pembangunan dari pemerintah yang bersifat terbuka, agar masyarakat dapat menyikapi hasil pembangunan yang telah diselenggarakan. Sebab apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan kebijakan pembangunan yang cukup dan hanya ikut-ikutan saja, tentunya bisa saja membuat masyarakat tidak menerima hasil pembangunan yang telah dilakukan, walaupun ia sendiri tidak tahu apa maksud dilaksanakannya pembangunan. Ketidakterimaan masyarakat dikarenakan rendahnya pengetahuan akan sebuah kebijakan bahwa dalam proses penyelenggaraan pembangunan tentu tidak bisa memuaskan semua pihak.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan Tambang

Secara prinsipnya partisipasi memiliki tujuan untuk mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penempatan kebijakan (keputusan) secara professional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan

yang akan ditetapkan di dalamnya. Secara spesifik partisipasi adalah konsultasi dengan bawahan atau kelompok yang terkena oleh suatu keputusan-keputusan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Untuk melakukan indentifikasi akan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat merupakan tahap yang krusial dalam merealisasikan partisipasi tersebut, sebab ketidakmampuan pemerintah dalam membangkitkan partisipasi masyarakat akan membuat masyarakat kurang peduli akan program-program pemerintah yang dilaksanakan.

a. Adanya Kesempatan

Tidak semua masyarakat peduli terhadap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Karena itu untuk terlaksananya pembangunan dengan baik, pemerintah perlu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memberi ruang partisipasi. Adanya kesempatan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam setiap kegiatan pembangunan, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk ikut serta, baik sebagai subjek dan objek.

Kesempatan ikut serta sebagai subjek adalah masyarakat diberikan ruang untuk ikut menjadi penyelenggara pelaksanaan pembangunan. Dimana nantinya masyarakat akan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan perolehan hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan. Adanya keterlibatan ini masyarakat akan mengetahui mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan pembangunan yang baik. Adapun kesempatan ikutserta sebagai objek artinya masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pelaksanaan setiap kegiatan pembangunan. Keterlibatan ini menunjukkan keikutsertaan masyarakat dalam mensukseskan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daerah mereka. Dengan

keterlibatan masyarakat ini, berarti mereka telah berpartisipasi dan berperan menentukan kegiatan pembangunan untuk daerahnya ini kedepannya.

Di Kecamatan Tambang, kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut sebagai subjek dan objek dalam pembangunan sudah diberikan seluas-luasnya. Dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk bisa menjadi pelaksana dari pembangunan atau aktif dalam rapat sewaktu perencanaan saja. Kesempatan yang diberikan bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan sikapnya agar bisa berpartisipasi aktif atau pasif.

Kalaupun masih ditemui rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan, bukanlah karena tidak adanya kesempatan yang diberikan. Mungkin masih adanya stigma bahwa pembangunan hanya tanggung jawab pemerintah kecamatan saja. Dengan demikian konsep otonomi daerah yang memungkinkan keterlibatan masyarakat yang lebih tinggi belum tersampaikan dengan baik. Peran serta masyarakat khususnya dalam proses perencanaan pembangunan kerap diabaikan dengan menjustifikasi keberadaan “wakil” masyarakat sebagai representasi utuh seluruh masyarakat.

Karena itu, untuk dapat meningkatkan derajat partisipasi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi, selain memberikan kesempatan yang lebih luas lagi, tentunya diperlukan kerja keras dari berbagai pihak yang terkait. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat yang semakin tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan disertai adanya sikap keterbukaan dari pemerintah itu sendiri tentunya akan menjadi arah bagi terwujudnya kepercayaan yang tinggi, dengan demikian akan memungkinkan terselenggaranya proses pemerintahan yang baik.

b. Adanya Kemauan

Setelah adanya kesempatan, kemauan juga menjadi hal penting dalam mengukur tinggi rendahnya partisipasi masyarakat. Adanya kemauan merupakan keinginan yang dimiliki oleh masyarakat untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya kemauan diwujudkan dengan adanya keinginan masyarakat untuk terlibat dalam seluruh kegiatan pelaksanaan pembangunan. Keterlibatan yang terjadi bisa secara aktif ataupun pasif.

Keterlibatan pasif dapat berupa perilaku masyarakat yang tidak ikut berperan aktif sama sekali dalam setiap pelaksanaan pembangunan, sedangkan keterlibatan aktif dapat terlaksananya dapat terwujud apabila masyarakat turut memikirkan bagaimana pelaksanaan pembangunan dapat lebih bermanfaat bagi daerahnya. Kemudian mewujudkan adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik sebagai subjek ataupun objek. Selanjutnya memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan taat kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki kerelaan untuk memiliki keinginan mengikuti pelaksanaan setiap pembangunan yang sedang maupun akan berlangsung.

Di Kecamatan Tambang, kemauan masyarakat untuk mengikuti kegiatan pembangunan nampak cukup besar. Sebagian besar masyarakat ketika ditanyakan tentang kemauannya terlibat dalam setiap kegiatan pembangunan menyatakan berharap dapat mengikutinya secara aktif. Namun keinginan tersebut tidak didorong oleh kemauan yang kuat dari masyarakat itu sendiri, misalnya ada masyarakat yang memang tidak mau hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah kecamatan. Misalnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat kurang memiliki inisiatif atau mencari tahu kenapa dirinya tidak bisa menjadi pemilih. Kemauan yang rendah untuk menelusuri mengapa dirinya tidak bisa jadi pemilih

padahal dirinya warga asli setempat, membuktikan bahwa kemauan masyarakat masih rendah untuk bisa berpartisipasi.

Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempengaruhi kehidupannya di masa sekarang dan akan datang. Selain itu kemauan berpartisipasi ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengatasi persoalannya di masa kini guna mencapai kehidupan yang baik. Dengan berkembangnya kehidupan berpartisipasi akan melibatkan setiap komponen dalam kegiatan-kegiatan yang akan diprogramkan oleh pemerintah. Strategi untuk meningkatkan partisipasi dicapai dengan cara melibatkan masyarakat dalam pertukaran informasi, merumuskan tujuan, kebijakan mengalokasikan sumber pendanaan, mengoperasikan program, serta mendistribusikan manfaat yang diperoleh.

c. Adanya Kemampuan

Kesempatan dan kemauan memang sangat mempengaruhi pemantapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tapi bila kedua aspek itu tidak diiringi dengan kemampuan, maka proses pembangunan bisa terkendala. Kemampuan dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan dengan menggunakan kompetensi dan keahlian yang dimilikinya. Kemampuan masyarakat di sini dinilai dari apakah ia sudah menggunakan haknya dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam kegiatan pembangunan. Karena dengan adanya kemampuan untuk bisa menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya, maka masyarakat akan mampu berbuat untuk pembangunan dengan baik.

Kemampuan masyarakat untuk menerima hasil pembangunan yang dilakukan di daerahnya, secara tidak langsung membuktikan kedewasaan berfikir masyarakat dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya. Di Kecamatan Tambang terlihat tingkat kemampuan masyarakat dalam mengikuti proses pembangunan sangatlah beragam. Faktor yang menyebabkannya tergantung tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik kemampuannya dalam berpartisipasi untuk kesuksesan pembangunan. Sebaliknya semakin banyak masyarakat yang berpendidikan rendah, maka yang terjadi umumnya kemampuan mereka dalam berpartisipasi juga rendah.

Fenomena yang dapat diamati adalah kemampuan masyarakat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya memang tergantung kepada pendidikan dan pemahaman yang dimilikinya. Dengan pendidikan dan pemahaman yang baik, masyarakat biasanya bisa menentukan tindakan yang realistis. Tetapi ada juga masyarakat yang melaksanakan pembangunan hanya memenuhi haknya saja, dia tidak peduli akan apa yang akan terjadi, yang penting haknya sudah tersampaikan. Umumnya di Kecamatan Tambang ini masyarakatnya masih memiliki kemampuan yang kurang terhadap pelaksanaan haknya sebagai warga yang baik. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakatnya. Rendahnya kemampuan masyarakat untuk bisa melaksanakan haknya ini disebabkan oleh pendidikan dan pemahaman yang terbatas akan pentingnya pembangunan.

G. Kesimpulan dan Saran

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dapat disimpulkan belum terlaksana dengan optimal. Walaupun ada sebagian masyarakat yang sudah memiliki iktikad baik untuk berpartisipasi, namun jika diamati lebih jauh masih banyak lagi yang tidak mau tahu dengan pembangunan di lingkungannya. Dari tiga macam partisipasi yang dilakukan masyarakat, partisipasi yang paling sering diikuti adalah partisipasi

dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan masyarakat biasanya hanya antusias pada permulaan kegiatan pembangunan, tapi kurang tanggap pada pelaksanaannya apalagi sampai melakukan pengawasan atas hasil pembangunan. Adapun dari tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, faktor adanya kesempatan nampaknya lebih menjadi landasan berpikir masyarakat dalam berpartisipasi dibandingkan dengan faktor adanya kemauan dan kemampuan. Artinya dapat dijelaskan bahwa kemauan dan kemampuan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan di daerah penelitian sangatlah rendah.

Saran yang dapat disampaikan adalah hendaknya pemerintah kecamatan terus melakukan upaya-upaya untuk merangsang masyarakat agar benar-benar memahami apa makna dan tujuan dari pembangunan. Jika masyarakat sudah memperoleh pendewasaan dan pengetahuan luas tentang pelaksanaan pembangunan, maka dapat dipastikan mereka akan ikut berpartisipasi lebih baik lagi. Kegiatan pemahaman ini misalnya dapat dilakukan melalui penyuluhan maupun pertemuan rutin antara pemerintah kecamatan dengan pemuka masyarakat desa secara bergiliran. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka perlu kiranya diadakan pembinaan secara terus menerus terhadap masyarakat, sehingga kemauan dan kemampuan mereka ikut berpartisipasi dapat ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Widodo, “Program Pengembangan Kecamatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Penguatatan Partisipasi Masyarakat dan Kelembagaan Lokal”, dalam *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.7, No. 2, Juni, 2002
- Agus Surjono, dkk, 2008, *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-UNIBRAW, Malang.
- Bappenas, Modul Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Public Governance) di Indonesia. Jakarta, 2008.
- Bryant, Coralie & Louise G. White, *Managing Development In The Third world*, LP3ES, Jakarta, 1989.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- Cohen., 1997., *Rural Development Partisipation.*, Cornel Univ.Press., Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, CIDES, Jakarta, 1996.
- Khairuddin, *Pembangunan Masyarakat : Tinjauan Aspek Sosiologis, Ekonomi, Perencanaan, Liberty*, Yogyakarta, 2000.
- Oyugi, W.O, *Good Governance and Local Government*, Tokyo, Tokyo University Press, 2000
- Sedarmayanti, *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Slamet Margono., 1995., *Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa.*, LPM Universitas Brawijaya., Malang.